

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan transformasi ekonomi yang terus berkembang, praktik perbankan syariah menjadi penting di kalangan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, salah satunya Indonesia. Hal ini menawarkan pasar yang sangat potensial bagi industri keuangan syariah. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun.¹ Sehingga memiliki potensi besar seiring meningkatnya kebutuhan layanan keuangan syariah.

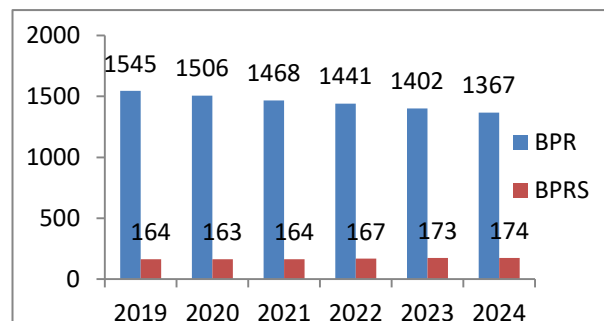
Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk lembaga keuangannya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² BPRS adalah lembaga keuangan perbankan yang berada di bawah otoritas pengawasan Dewan Kebijakan Moneter dengan menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa menggunakan sistem bunga (riba), dan berorientasi pada pemberian layanan keuangan bagi masyarakat di tingkat pedesaan atau kecamatan.³ Pembentukan BPRS didasarkan pada Undang-Undang No. 7

¹ Fatimah, dkk, "Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia", *Peka: Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, Vol. 11 No 2, (2023), h. 79

² Fitriani, dkk, "Perkembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 1, no. 1 (2023), h. 83

³ Yulia Fithriany, dkk, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat," *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* , Vol 4 No. 01, (2024), h. 41

Tahun 1992 tentang Perbankan dan didefinisikan lebih lanjut, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah tanpa menyediakan layanan lalu lintas pembayaran.⁴ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pelayanan masyarakat pedesaan dan beroperasi sesuai peraturan yang menjamin kepatuhan pada prinsip syariah.



Sumber: <https://ibpr-s.ojk.go.id>

Grafik 1.1 Jumlah BPR dan BPRS di Indonesia Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan grafik yang disajikan, jumlah BPR mengalami penurunan secara konsisten setiap tahun, dimulai sebanyak 1.545 tahun 2019 menjadi 1.506 pada tahun 2020, lalu berkurang menjadi 1.468 tahun 2021 hingga tersisa 1.367 tahun 2024. Di sisi lain, jumlah BPRS menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan pertumbuhan positif. Pada tahun 2019, jumlah BPRS tercatat sebanyak 164 unit, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 163 unit pada tahun 2020, tetapi tahun 2021, jumlah BPRS kembali mengalami peningkatan ke angka 164 unit, mencerminkan pemulihan yang cepat. Pertumbuhan ini berlanjut dan mencapai 174 unit pada tahun 2024.

⁴ *Ibid.*, h. 41

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, jumlah BPR menurun secara konsisten dalam lima tahun terakhir, sedangkan BPRS mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah.

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia mencerminkan perannya dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BPRS tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga menjadi penunjang utama dalam pengembangan usaha produktif. Peran ini turut mendorong pertumbuhan sektor riil yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁵ Namun meskipun BPRS mengalami pertumbuhan positif, potensi kebangkrutan tetap tidak terhindarkan, karena diikuti oleh bertambahnya kasus kebangkrutan dalam beberapa tahun terakhir.

Kebangkrutan merupakan keadaan di mana perusahaan mengalami ketidakstabilan operasional akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, pada akhirnya berdampak menurunnya tingkat profitabilitas.⁶ Kondisi ini mencerminkan lemahnya kinerja keuangan perusahaan dan dapat berdampak serius jika tidak segera ditangani. Berikut disajikan data mengenai BPRS yang mengalami kebangkrutan selama periode 2019 hingga 2025:

⁵ Iis Nur'aisyah, dkk, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat." *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, (2020), Vol.5 No. 2, h. 125

⁶ Muhammad Taufik Abadi and Dwi Novaria Misidawati, *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan:Teori, Metode, Implementasi*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), h. 3

Tabel 1.1
BPRS yang mengalami kebangkrutan tahun 2019-2025

Tahun	BPRS	Provinsi
2019	BPRS Safir Bengkulu	Bengkulu
	BPRS Muamalat Yotefa	Papua
	BPRS Hareukat	Aceh
	BPRS Jabal Tsur	Jawa Timur
2020	BPRS Gotong Royong	Jawa Barat
2021	BPRS Asri Madani Nusantara	Jawa Timur
2022	-	-
2023	-	-
2024	BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Perseroda	Jawa Timur
	BPRS Saka Dana Mulia	Jawa Tengah
	BPRS Kota Juang Perseroda	Aceh
2025	BPRS Gebu prima	Sumatera Utara

Sumber: <https://apps.lps.go.id/bankdalamlikuidasi>

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan pada tahun 2019 ada 4 BPRS yang dihentikan operasionalnya. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing tahun tutup 1 BPRS. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada BPRS yang bangkrut. Peningkatan terjadi kembali pada tahun 2024, dimana 3 BPRS yang resmi ditutup. Terakhir pada tanggal 17 April 2025 BPRS yang ditutup, berlokasi di Sumatra bagian Utara yaitu BPRS Gebu Prima, alasan ditutup karena tidak memenuhi tingkat permodalan dan kesehatan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebagian besar kebangkrutan BPRS yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya penyimpangan (fraud) yang dilakukan oleh pemilik, pengurus dan karyawan. Selain itu, meliputi ketidakmampuan dalam memenuhi ketentuan pihak ketiga (KPM) atau Kewajiban Penyediaan Modal, kegagalan dalam memenuhi kewajiban

pembayaran kepada nasabah, memburuknya kinerja keuangan dan lemahnya praktik tata kelola perusahaan.⁷ Hal tersebut menegaskan kebangkrutan BPRS lebih banyak bersumber dari permasalahan internal.

Permasalahan kebangkrutan yang teridentifikasi, menunjukkan bahwa risiko kebangkrutan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan analisis dalam memprediksi kondisi BPRS untuk menilai tingkat kesehatannya. Pencegahan kebangkrutan dapat dilakukan melalui pengembangan sistem peringatan dini dengan menerapkan metode analisis laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan merupakan langkah memeriksa laporan keuangan dan mempelajari hubungan serta pola (trend) untuk menilai keadaan keuangan serta kinerja dan elemen-elemen terkait yang bertujuan menilai dan meramalkan situasi keuangan dari suatu entitas.⁸ Menganalisis laporan keuangan dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko kebangkrutan yang mungkin dihadapi BPRS dimasa yang akan datang. Namun, untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat diperlukan penerapan metode analisis yang tepat dalam mengukur potensi kebangkrutan.

Dalam konteks ini, metode yang digunakan untuk menganalisis potensi kebangkrutan meliputi Altman Z-Score, Zmijewski, dan Grover. Alasan pemilihan ketiga metode tersebut karena penggunaan kombinasi dari

⁷ Vibiznews, "Banyak BPR Bangkrut dan Tutup di Indonesia, Apa Penyebabnya?" <https://vibiznews.com/index.php/2025/05/12/banyak-bpr-bangkrut-dan-tutup-di-indonesia-apa-penyebabnya/>. Diakses pada 27 Mei 2025

⁸ Astuti Dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 4

berbagai metode dapat meningkatkan akurasi prediksi, yang sangat relevan bagi manajemen BPRS dalam mengevaluasi kinerja dan posisi finansial mereka dan masing-masing metode memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri dalam mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Metode Altman Z-Score merupakan salah satu pendekatan yang paling terkenal dalam memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan. Metode ini dikembangkan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968 melalui penelitian yang berfokus pada fenomena kebangkrutan. Hasil dari penelitian tersebut melahirkan rumus Z-Score, yang dirancang untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang relevan serta pemberian bobot tertentu pada masing-masing rasio. Altman Z-Score menjadi alat analisis yang efektif dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan.⁹ Metode Altman menjadi alat penting yang dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko kebangkrutan secara dini sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Sementara itu, metode Zmijewski merupakan metode analisis dengan model *Logit Regression* yaitu metode yang menggunakan rasio profitabilitas (ROA), leverage (Debt Ratio), dan likuiditas (Current Ratio). Pada dasarnya, metode ini membantu menentukan apakah perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan atau tidak.¹⁰ Metode Zmijewski efektif dalam mengukur

⁹ Marison Sitorus dan Siti Maryani Yulita, "Analisis Potensi Kebangkrutan Pada PT. Prima Mulia Engineering Dengan Metode Altman Z-Score Untuk Periode 2017-2020", *Jurnal Teknologi Dan Manajemen*, Vol 21 No. 1, (2023), h. 3

¹⁰ Yoga Taufan Fahma dan Nina Dwi Setyaningsih, "Analisis Financial Distress Dengan Metode Altman, Zmijewski, Grover, Springate, Ohlson Dan Zavgren Untuk Memprediksi

kesehatan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan profitabilitas, leverage, dan likuiditas sebagai indikator utama.

Adapun metode Grover merupakan penyempurnaan dari model Altman dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi yang lebih modern. Metode ini merupakan hasil desain dan kalkulasi ulang dari metode Altman (1968) yang dikembangkan oleh Jeffrey oleh S. Grover. Model Grover disusun dengan menganalisis rasio rasio keuangan yang dianggap berpengaruh signifikan dalam model Altman, kemudian diperkaya dengan penambahan rasio baru sebagai bahan perbandingan.¹¹ Metode Grover menjadi pengembangan penting dari metode Altman yang lebih akurat dan relevan untuk menganalisis kebangkrutan.

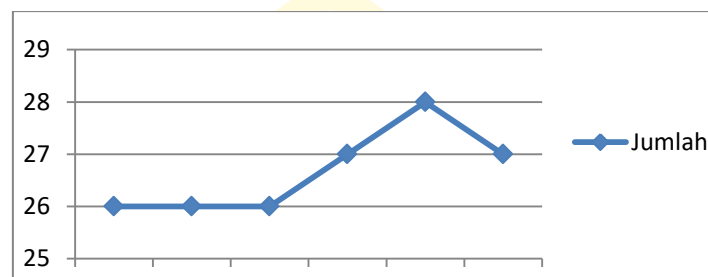
Penerapan ketiga metode tersebut adalah pendekatan yang disarankan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai risiko kebangkrutan. Selain itu, hasil analisis memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengembangan kebijakan keuangan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Objek penelitian ini berfokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Tengah. Alasan mengambil objek penelitian ini karena berdasarkan data OJK per akhir tahun 2024, menunjukkan bahwa pertumbuhan kinerja BPRS relatif rendah dibandingkan bank umum maupun

Kebangkrutan Pada Perusahaan Ritel”, *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* , Vol 15 No. 2, (2021), h. 201

¹¹ Laura Stephanie Chandra, dkk, “Analisis Risiko Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Jiwa Indonesia Menggunakan Metode Altman Springate, Grover, Dan Zmijewski”, *VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications*, Vol 6 No. 1, (2024), h. 11-12

perbankan syariah. Per Oktober 2024, Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya tumbuh 3,47% menjadi Rp 40,09 triliun, sementara penyaluran kredit naik tipis 1,37% menjadi Rp 38,34 triliun. Pertumbuhan yang lambat ini menjadi sinyal adanya potensi masalah dalam ekspansi usaha dan pengelolaan risiko pembiayaan.¹² Selain itu, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah BPRS yang cukup banyak, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengelola, regulator, maupun pihak terkait lainnya. Berikut terdapat jumlah perkembangan BPRS di Jawa Tengah dari tahun 2019-2024:



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2022-2024

Grafik 1.2 Jumlah BPRS di Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Grafik di atas menggambarkan perkembangan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Jawa Tengah dalam rentang waktu 2019 hingga 2024. Secara umum, jumlah BPRS cenderung stabil pada tahun 2019 sampai 2021 yaitu berjumlah 26 BPRS, kemudian meningkat menjadi 27 BPRS pada tahun 2022 dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 28 BPRS, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan sehingga

¹² Radio Republik Indonesia, “Akhir 2024, Sektor Jasa Keuangan Jateng Stabil Terjaga, <https://rri.co.id/jawa-tengah/keuangan/1214730/akhir-2024-sektor-jasa-keuangan-jateng-stabil-terjaga>”. Diakses pada 30 Juli 2025

kembali berjumlah 27 BPRS. Jumlah BPRS di Jawa Tengah menunjukkan kestabilan pada periode 2019-2021, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024.

Di Jawa Tengah, kebangkrutan terjadi pada tahun 2024 pada BPRS Saka Dana Mulia, alasan bangkrut disebabkan oleh kombinasi internal yaitu permasalahan permodalan dan likuiditas yang tidak berhasil diatasi oleh manajemen. Pada 10 April 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan BPRS Saka Dana Mulia dalam status pengawasan bank dalam penyehatan dengan pertimbangan bahwa tingkat kesehatan bank tersebut tergolong kurang baik. Selanjutnya, pada 12 Januari 2024, OJK mengubah status BPRS Saka Dana Mulia menjadi pengawasan BDR, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memperbaiki permasalahan BPRS tersebut. Namun, upaya penyehatan yang dilakukan tidak membuahkan hasil, sehingga OJK menyerahkan penanganan lebih lanjut kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS kemudian memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPRS tersebut.¹³ Bangkrutnya BPRS Saka Dana Mulia akibat masalah permodalan dan likuiditas yang tidak teratasi. Kondisi tersebut menunjukkan gejala ketidakstabilan yang mulai terlihat di industri BPRS di Jawa Tengah.

Penelitian ini dilandasi oleh peran strategis BPRS dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan pembiayaan syariah bagi UMKM, sehingga stabilitas keuangan

¹³ CNBC indonesia, “Alasan 12 Bank Bangkrut di RI Sejak Awal 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240524150557-17-540920/alasan-12-bank-bangkrut-di-ri-sejak-awal-2024>”. Diakses pada 28 April 2025

BPRS sangat menentukan kepercayaan masyarakat. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap potensi risiko kebangkrutan guna memastikan keberlanjutan operasional lembaga tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengangkat judul “Analisis Kebangkrutan dengan Metode Altman, Zmijewski, dan Grover pada BPRS di Jawa Tengah yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian seperti berikut:

1. Apakah terdapat BPRS di Jawa Tengah yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024 yang berpotensi untuk bangkrut?
2. Apakah terdapat perbedaan dari hasil analisis kebangkrutan antara metode Altman dan Zmijewski, Altman dan Grover, Zmijewski dan Grover pada BPRS di Jawa Tengah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2024 ?
3. Apakah terdapat perbedaan dari hasil analisis kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman, Zmijewski dan Grover pada BPRS di Jawa Tengah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui BPRS di Jawa Tengah yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024 yang berpotensi untuk bangkrut.
2. Untuk mengetahui perbedaan dari hasil analisis kebangkrutan antara metode Altman dan Zmijewski, Altman dan Grover, Zmijewski dan Grover pada BPRS di Jawa Tengah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2024
3. Untuk mengetahui perbedaan dari hasil analisis kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman, Zmijewski, dan Grover pada BPRS di Jawa Tengah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2024

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian yang telah di uraikan, diharapkan memperoleh manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan model prediksi kebangkrutan yang efektif untuk mengevaluasi kondisi keuangan BPRS
2. Bagi nasabah BPRS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menjalankan aktivitas dengan BPRS, mengingat nasabah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebangkrutan dan kestabilan keuangan BPRS..

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang metode prediksi kebangkrutan yang tepat untuk BPRS dan menjadi sumber referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka dibuatkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian dengan judul Analisis Kebangkrutan dengan metode Altman, Zmijewski dan Grover pada BPRS di Jawa Tengah yang Terdaftar di OJK Periode 2022-2024, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan kajian teori dari permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan judul.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian seperti jenis penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasannya

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi